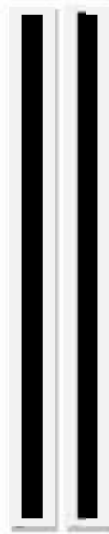




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL
2021**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Sosial.

LAKIP Dinas Sosial ini tidak terlepas dari kekurangan - kekurangan, namun demikian saran kritik dari semua pihak diharapkan untuk upaya memperbaiki, menyempurnakan laporan LAKIP ini. Mudah-mudahan LAKIP Dinas Sosial ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Selong, 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur



MAHSIN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199203 1126

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.5 Kondisi SDM Aparatur	6
1.6 Kondisi Sarana dan Prasarana	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	16
2.2 PERJANJIAN KINERJA	23
2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 PENGUKURAN KINERJA	31
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	32
3.3 ALOKASI ANGGARAN	61
3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN	65
BAB IV PENUTUP	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang Sosial.

Pembangunan urusan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta Meningkatkan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Memperdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada.

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan masalah yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam bingkai persatuan dan kesatuan dilandasi iman dan takwa. Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dengan hasil capaian kinerja dinas. Pembuatan LAKIP

ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Sasaran penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai Laporan Kegiatan Strategis baik berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas untuk tahun anggaran 2021. Oleh karena itu LAKIP ini memuat hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta rangkuman hasil kinerja sebagaimana yang telah direncanakan dalam Tahun Anggaran 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 sebagai salah satu perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851) ;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);
- 5) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003;

- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 nomor 6, tambahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 nomor 6, tambahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4).

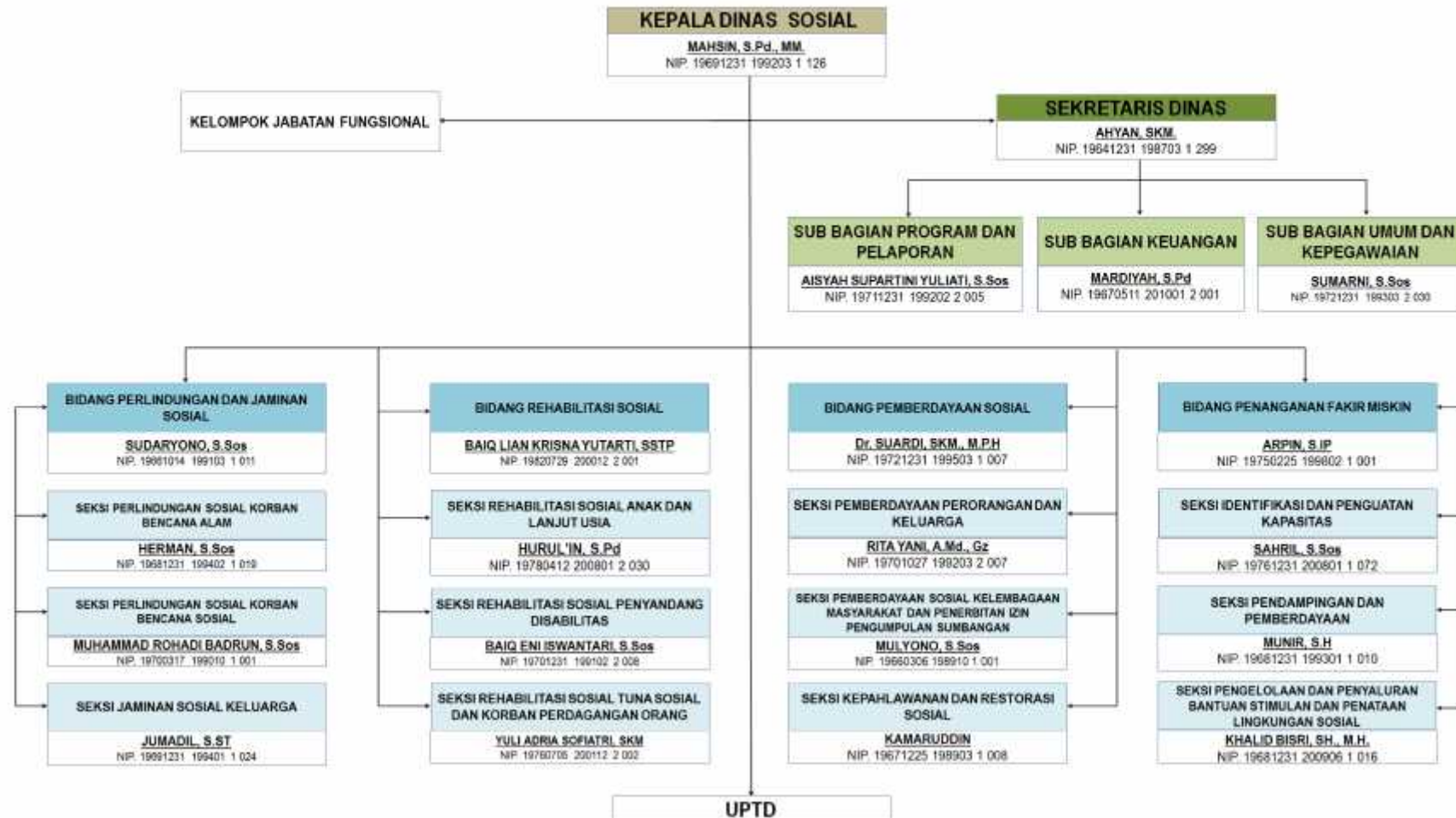
Gambaran organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris Dinas, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- 4) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 5) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;

- b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- 6) Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.
- 7) UPT; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021
(BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2020)



1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a). Kedudukan

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b). Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan Pemerintahan yang mengatur kewenangan Daerah.

c). Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 KONDISI SDM APARATUR

Untuk mendukung agar pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memerlukan ketersediaan aparat / sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi yang tepat dan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah aparatur / pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Desember 2021 tercatat 32 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.5.1
 Keadaan PNS menurut, Golongan, Jenis Jabatan dan Pendidikan
 pada Dinas Sosial
 Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

JUM.PEG.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGGAT/GOL.	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
BAGIAN SEKRETARIAT				
16 Orang	SD :- Org SLTP :- Org SLTA : 2 Org DI :- Org DII :- Org DIII :- Org S1 : 3 Org SII : 2 Org SIII :- Org	Juru Muda (I/a) :- Org Juru Muda Tk. I (I/b) :- Org Juru (I/c) :- Org Juru Tk. I (I/d) :- Org Pengatur Muda (II/a) :- Org Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 Org Pengatur (II/c) : 1 Org Pengatur Tk. I (II/d) :- Org Penata Muda (III/a) :- Org Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 Org Penata (III/c) : 2 Org Penata Tk.I (III/d) : 2 Org Pembina (IV/a) : 1 Org Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Org Pembina Utama Muda (IV/c) :- Org	Eselon II/b : 1 Org Eselon III/a : 1 Org Eselon III/b :- Org Eselon IV/a : 2 Org Eselon IV/b :- Org Eselon V/a :- Eselon V/b :-	

JUM.PEG.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGGAT/GOL.	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
BIDANG REHSOS (REHABILITASI SOSIAL)				
6 Orang	SD : Org SLTP :- Org SLTA : 1 Org DI :- Org DII :- Org DIII : 1 Org S1 : 5 Org SII :- Org SIII :- Org	Juru Muda (I/a) :- Org Juru Muda Tk. I (I/b) :- Org Juru (I/c) : Org Juru Tk. I (I/d) :- Org Pengatur Muda (II/a) :- Org Pengatur Muda Tk. I (II/b) :- Org Pengatur (II/c) :- Org Pengatur Tk. I (II/d) :- Org Penata Muda (III/a) :- Org Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 Org Penata (III/c) :- Org Penata Tk.I (III/d) : 2 Org Pembina (IV/a) : 1 Org Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Org Pembina Utama Muda (IV/c) : Org	Eselon II/b :- Org Eselon III/a :- Org Eselon III/b : 1 Org Eselon IV/a : 3 Org Eselon IV/b :- Org Eselon V/a :- Eselon V/b :-	1. Fungsional Pekerja Sosial

BIDANG PSPFM (PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN)							
6 Orang	SD	: - Org	Juru Muda (I/a)	: - Org	Eselon II/b	: 1 Org	
	SLTP	: 1 Org	Juru Muda Tk. I (I/b)	: - Org	Eselon III/a	: 1 Org	
	SLTA	: 2 Org	Juru (I/c)	: - Org	Eselon III/b	: - Org	
	DI	: - Org	Juru Tk. I (I/d)	: - Org	Eselon IV/a	: 2 Org	
	DII	: - Org	Pengatur Muda (II/a)	: - Org	Eselon IV/b	: - Org	
	DIII	: 1 Org	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	: 1 Org	Eselon V/a	: -	
	S1	: 1 Org	Pengatur (II/c)	: 1 Org	Eselon V/b	: -	
	SII	: 1 Org	Pengatur Tk. I (II/d)	: - Org			
	SIII	: 1 Org	Penata Muda (III/a)	: 1 Org			
			Penata Muda Tk. I (III/b)	: - Org			
			Penata (III/c)	: 2 org			
			Penata Tk.I (III/d)	: 1 Org			
			Pembina (IV/a)	: - Org			
			Pembina Tk. I (IV/b)	: 1 Org			
Pembina Utama Muda (IV/c)			: - Org				
BIDANG LINJAMSOS (PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)							
4 Orang	SD	: - Org	Juru Muda (I/a)	: - Org	Eselon II/b	: - Org	SD
	SLTP	: - Org	Juru Muda Tk. I (I/b)	: - Org	Eselon III/a	: - Org	SLTP
	SLTA	: 1 Org	Juru (I/c)	: - Org	Eselon III/b	: 1 Org	SLTA
	DI	: - Org	Juru Tk. I (I/d)	: - Org	Eselon IV/a	: 3 Org	DI
	DII	: - Org	Pengatur Muda (II/a)	: - Org	Eselon IV/b	: - Org	DII
	DIII	: - Org	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	: - Org	Eselon V/a	: -	DIII
	DIV	: 1 Org	Pengatur (II/c)	: 1 Org	Eselon V/b	: -	S1
	S1	: 4 Org	Pengatur Tk. I (II/d)	: - Org			SII
	SII	: 1 Org	Penata Muda (III/a)	: - Org			SIII
	SIII	: - Org	Penata Muda Tk. I (III/b)	: Org			
			Penata (III/c)	: 2 org			
			Penata Tk.I (III/d)	: 2 Org			
			Pembina (IV/a)	: 2 Org			
			Pembina Tk. I (IV/b)	: - Org			
Pembina Utama Muda (IV/c)			: - Org				

1.6. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan fungsinya, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung, Untuk mengetahui lebih jauh sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6.1
Keadaan Sarana dan Prasarana
pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur
(Daftar Terlampir)

NO	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
I. TANAH						
1.	Tanah Bangunan Pasar	2017	6.284.00	M ²	2.598.264.000	Pasar tradisional dari Bapendda
2.	Tanah untuk makam Pahlawan	1980	9.200.00	M ²	378.840.000	Pindah SKPP dari STT
	Jumlah				2.977.104.000	
II. PERALATAN DAN MESIN						
1	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
5	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	9	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
7	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	2	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
9	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
10	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
11	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1/1/2012	1	buah	19.500.000,00	MUTASI DARI KEC. WANASABA KE DINAS SOSIAL
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1/1/2019	4	buah	217.500.000,00	Kepala Dinas
13	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1/1/2007	05/01/1900	buah	100.800.000,00	2019 Mutasi ke Setda kemudian ke BKPSDM dan mutasi lagi ke sosial tahun 2020

14	Truck + Attachment	1/1/2005		buah	166.000.000,00	kendaraan dari Nakertrans/Pemegang Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
15	Sepeda Motor	1/1/1997	6	buah	7.429.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans kendaraan ada di gudang
16	Sepeda Motor	1/1/2003		-	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang, M.JUNIARDI
17	Sepeda Motor	1/1/2003			10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (AISYAH SUPARTINI YULIANTI)
18	Sepeda Motor	1/1/2006	4	buah	11.300.000,00	Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (SAEPUL) TKSK
19	Sepeda Motor	1/1/2002	2	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan ada di gudang
20	Sepeda Motor	1/1/2002	1	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (MASKUR HAIDI)
21	Sepeda Motor	1/1/2003	1	buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Kendaraan ada di gudang
22	Sepeda Motor	1/1/2001	3	buah	9.800.000,00	Barang dari Hutbun Pemegang (SAHRUDIN,S.Sos)
23	Sepeda Motor	1/1/2008	1	buah	12.500.000,00	Barang dari Hutbun. Pemegang (NANANG SYAHRONI)
24	Sepeda Motor	1/1/2017	2	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (MARDIYAH,SPd)
25	Sepeda Motor	1/1/2017	1	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (SUMARNI,S.Sos)
26	Sepeda Motor	1/1/2011	1	paket	19.496.575,00	KADES DASAN LEKONG
27	Sepeda Motor	1/1/2012	2	set	19.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Aikmel Ke DINSOS 2019
28	Sepeda Motor	1/1/2012	1	paket	19.500.000,00	KENDARAAN DINAS UNTUK KEPALA DESA SAPIT
29	Sepeda Motor	1/1/2003	1	paket	11.500.000,00	MUTASI DISHUB PEMEGANG Drs.EDY SUPRAYITNO
30	Sepeda Motor	1/1/2012			19.500.000,00	Mutasi dari Kec. Wanasaba
31	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2011	1	set	19.500.000,00	PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 KEPALA DESA/ KE DINAS SOSIAL
32	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	2'	buah	13.727.750,00	KE DINAS SOSIAL
33	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2012			19.650.000,00	KE DINAS SOSIAL
34	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
35	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
36	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019

37	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
38	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1/1/2013	1	buah	13.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
39	Lemari Penyimpan	1/1/2013	1	buah	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
40	Lemari Besi/Metal	1/1/2015	1	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
41	Lemari Besi/Metal	1/1/2015	14	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
42	Lemari Besi/Metal	1/1/2019			22.169.000,00	lemari besi 7 buah untuk perlengkapan kantor, Tinggi 140 cm Lebar 40 cm
43	Lemari Kayu	1/1/2014	60	buah	3.750.000,00	Barang dari Hutbun
44	Lemari Kayu	1/1/2015	14	buah	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
45	Lemari Kayu	1/1/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
46	Lemari Kayu	1/1/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
47	Lemari Kayu	1/1/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
48	Lemari Kayu	1/1/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
49	Lemari Kayu	1/1/2015			3.250.000,00	Barang dari Hutbun
50	Lemari Kayu	1/1/2015			3.250.000,00	Baarang dari Hutbun
51	Rak Kayu	1/1/2016			3.500.000,00	Barang dari Hutbun
52	Filing Cabinet Besi	1/1/2015			2.568.000,00	Barang dari Hutbun
53	Filing Cabinet Besi	1/1/2016			2.600.000,00	Barang dari Hutbun
54	Brandkas	1/1/2014			13.107.500,00	Barang dari Hutbun
55	Papan Pengumuman	1/1/2017			3.375.000,00	Pembelian
56	Papan Tulis	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Hutbun
57	Alat Kantor Lainnya	13/10/2020			7.000.000,00	Pengadaan Running Teks
58	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
59	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
60	Kursi Besi/Metal	1/1/2014			2.500.000,00	Barang dari Hutbun
61	Kursi Besi/Metal	13/10/2020			1.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja
62	Meja Rapat	15/10/2020			30.000.000,00	Pengadaan Meja Rapat
63	Tempat Tidur Kayu	24/04/2020			36.750.000,00	Pengadaan Tempat Tidur
64	Meja 1/2 Biro	1/1/2015			6.000.000,00	Barang dari Nakertrans
65	Meja 1/2 Biro	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
66	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			3.960.000,00	Barang dari Nakertrans
67	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			2.860.000,00	Barang i Nakertrans
68	Meja 1/2 Biro	1/1/2016			1.216.000,00	Barang dari Nakertrans
69	Meja 1/2 Biro	13/10/2020			3.605.000,00	Pengadaan meja 1/2 biro
70	Kasur/Spring Bed	24/04/2020			13.500.000,00	Pengadaan Kasur
71	Kasur/Spring Bed	24/04/2020			6.825.000,00	Pajak
72	Kursi Rapat	1/1/2014			2.200.000,00	Barang dari Hutbun
73	Kursi Rapat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
74	Kursi Rapat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
75	Kursi Rapat	03/11/2020			11.760.000,00	
76	Kursi Putar	1/1/2016			4.466.500,00	Barang dari Nakertrans
77	Kursi Putar	1/1/2015			1.000.000,00	Barang dari Hutbun

78	Kursi Putar	1/1/2015			3.000.000,00	Barang dari Hutbun
79	Kursi Putar	1/1/2017			3.125.000,00	Pembelian
80	Kursi Lipat	1/1/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
81	Kursi Lipat	1/1/2014			550.000,00	Barang dari Hutbun
82	Meubeleur lainnya	13/10/2020			2.105.000,00	Pengadaan Lemari Rias
83	Mesin Pemotong Rumput	1/1/2017			3.890.000,00	Pembelian
84	A.C. Window	1/1/2016			20.000.000,00	Barang dari Hutbun (Pindah)ke Ruangn SEKDIS
85	A.C. Split	1/1/2016			19.500.000,00	2019 Mutasi ke Dinas Sosial
86	Kipas Angin	1/1/2016			750.000,00	Barang dari Hutbun
87	Alat Pendingin lainnya	1/1/2017			5.460.000,00	Pembelian
88	Sound System	1/1/2013	1	buah	2.000.000,00	Barang dari Nakertrans
89	Sound System	05/11/2020	1	Buah	17.548.000,00	Pengadaan 1 (satu) unit Sond system Komplit
90	Wireless	1/1/2015	1	buah	8.000.000,00	Barang dari Nakertrans
91	Gordyin/Kray	1/1/2019	1	paket	8.100.000,00	Penghias Ruangn/gordyn
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24/04/2020	1	paket	11.400.000,00	Pengadaan 2 Set Meja Makan dan Kursi
93	Alat Rumah Tangga Lain-lain	04/11/2020	1	paket	7.200.000,00	Pengadaan Trali kusen jendela
94	Alat Rumah Tangga Lain-lain	03/11/2020	1	paket	21.835.000,00	
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			16.737.500,00	Perbidang
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			66.950.000,00	
97	Meja Tamu Ruangn Tunggu Pejabat Eselon II	13/10/2020			7.913.100,00	Pengadaan Meja kursi Tamu 1 (satu) set
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13/10/2020			4.500.000,00	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon II
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	03/11/2020			9.280.000,00	
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1/1/2019			48.926.000,00	Kursi Pejabat Eselon IV
101	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1/1/2014	1	buah	1.250.000,00	Barang dari Nakertrans
102	Buffet Kaca	13/10/2020	1	buah	2.055.000,00	Pengadaan Rak Arsip
103	Telephone Hybrid	1/1/2014	1	buah	1.200.000,00	Barang dari Hutbun
104	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1/1/2017	1	buah	799.400,00	Pembelian
105	Layar Film/Projector	1/1/2019	1	buah	10.806.500,00	Perlengkapan Kantor
106	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1/1/2015	1	buah	1.292.500,00	Barang dari BLHPM
107	Internet	1/1/2013	1	unit	49.000.000,00	Barang dari Hutbun
108	P.C Unit	1/1/2014			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
109	P.C Unit	1/1/2015			5.000.000,00	Barang dari Nakertrans
110	P.C Unit	1/1/2015			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
111	P.C Unit	1/1/2014			10.500.000,00	Barang dari Hutbun
112	P.C Unit	1/1/2015			6.350.000,00	Barang dari BLHPM
113	P.C Unit	1/1/2017			34.000.000,00	Pembelian
114	P.C Unit	1/1/2017			17.985.000,00	Pembelian
115	P.C Unit	1/1/2018			8.443.000,00	Pembelian Peruntukan Operator (PKH)

116	P.C Unit	1/1/2018			8.443.000,00	Pembelian
117	P.C Unit	1/1/2019			36.742.500,00	pc unit
118	P.C Unit	1/1/2018			25.485.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH
119	P.C Unit	1/1/2018			8.490.000,00	Pembelian Peruntukan SUB BAG Keuangan dan Pelaporan
120	P.C Unit	01/04/2020			13.550.000,00	Komputer PC
121	P.C Unit	01/04/2020			8.991.000,00	Pengadaan Komputer PC 2020
122	Lap Top	1/1/2015			7.000.000,00	Barang dari Nakertrans
123	Lap Top	1/1/2017			63.993.600,00	Pembelian
124	Lap Top	1/1/2017			18.500.000,00	Pembelian
125	Lap Top	1/1/2019			8.755.000,00	Lap top / Sekretariat
126	Lap Top	1/1/2019			30.607.500,00	lap top
127	Note Book	1/1/2017	60	buah	89.958.000,00	tablet Pembelian Jumlah 60 Pruntukan (SLRT)
128	Line Printer	1/1/2019			18.878.000,00	Perlengkapan Kantor
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2015			1.500.000,00	Barang dari Nakertrans
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			4.000.000,00	Pembelian
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2017			2.500.000,00	Pembelian
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			2.466.700,00	Peruntukan Operator PKH
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			2.290.000,00	Pembelian (Propel)
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2018			9.129.000,00	Pembelian
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/1/2019			4.769.500,00	Sekretariat
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/04/2020			8.800.000,00	Pengadaan Printer 2020
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	Pengadaan Printer 2020
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020			2.200.000,00	pegadaan Printer 2020
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16/11/2020			1.699.000,00	Pengadaan Printer
143	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2017	1	unit	2.750.000,00	Pembelian
144	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2018	1	unit	3.415.500,00	Pembelian
145	Peralatan Jaringan lainnya	1/1/2018	1	unit	3.415.500,00	Pembelian
146	Air Conditioning (AC)	1/1/2019			21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
147	Air Conditioning (AC)	03/11/2020			38.110.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC
	Jumlah				2.149.745.004,00	
III. GEDUNG DAN BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			79.616.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			452.364,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			4.523.636,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.618.182,00	

5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.261.818,00	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			18.094.545,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			1.809.454,00	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			1.809.454,00	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			18.094.546,00	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.495.000,00	
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.455.000,00	
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			35.000.000,00	sekat ruangan
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			187.500.000,00	Penambahan Gedung Kantor
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			56.990.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Trauma Centre (RPTC)/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			179.780.000,00	gapura makam pahlawan (hujat)
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			9.800.000,00	Biaya Pendukung Untuk Penataan Makam Pahlawan
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	04-Mei-20			2.500.000,00	Biaya Pendukung untuk pekerjaan Sekat Ruangan Gedung Kantor
19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			128.310.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			6.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (RPTC)
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			7.800.000,00	Biaya Pendukung pada Keg. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (Penataan Makam Pahlawan)
22	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			8.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (RPTC)
23	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	31-Jan-11			352.978.850,00	Bangunan Gor selaparang Mutasi dari dikbud
24	Tugu Kemerdekaan				43.214.250,00	PINDAH SKPD DARI STT
	Jumlah				1.193.703.099,00	
IV. JALAN IRIGASI DAN JARINGAN						
1	Jalan Khusus Lainnya	31-Des-11			72.700.000,00	Pindahan SKPD dari Hutbun
2	PLTN Lain-lain	01-Jan-14			10.000.000,00	Pindah SKPD dari STT (Instalasi Listrik TMP)
	Jumlah				82.700.000,00	

V. ASSET TETAP LAINNYA						
1	Peta Citra Sport	2008			11.000.000,00	Pindah SKPD dari Hutbun
2	Alat Kesenian Lain-lain	2014			7.525.000,00	Pindah SKPD dari STT
3	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			9.360.000,00	Piala
4	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			15.040.000,00	Pindah SKPD dari STT
	Jumlah				42.925.000,00	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2018 – 2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan adalah visi yang menggambarkan atau kondisi masa depan daerah Kabupaten Lombok Timur yang ingin dicapai . Visi itu juga yang digunakan oleh Dinas Sosial, yaitu:

“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, DAN AMAN “.

Lombok Timur Adil :

Hal ini bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Lombok Timur Sejahtera :

Hal ini bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lombok Timur Aman:

Hal ini bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yang dirumuskan untuk mencapai Visi Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi – fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius.
6. Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Berkaitan dengan misi dan program kerja Bupati tahun 2018 – 2023, untuk 5 (lima) tahun ke depan maka Dinas Sosial mengacu pada salah satu misi Bupati yang ke 3 (tiga), yaitu “Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi–fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya”.

Program adalah Rencana Strategis (renstra) 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Rencana Kerja (renja). Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;

2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu ;

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	PROGRAM
Mewujudkan penurunan angka kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS			100%	1. Program Penunjang Urusan Pamewrintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemberedayaan Sosial 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Program Penanganan Bencana 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2.1.1 TUJUAN STRATEGIS

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2018–2023 yakni “Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan”.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur akan lebih baik apabila mengetahui sumberdaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, yang sesuai dengan Misi Bupati yaitu Misi ke 3 (tiga) yaitu “Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi – fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya”.

2.1.2 SASARAN STRATEGI

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menetapkan sasaran strategis yaitu “Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan”.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Penurunan angka kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS			63	55	53	48	43

2.1.3 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Bahwa setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (Sasaran Indikator) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah :

“Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

Tabel 2.3
Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial Kab. Lotim
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

		<p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1. Pengadaan Mebel</p> <p>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
		<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<p>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<p>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</p> <p>1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</p>

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<p>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sandang 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 4. Pemberian Layanan Kedaruratan <p>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 5. Pemberian Layanan Rujukan 6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<p>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<p>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 5. Pelayanan Dukungan Psikososial <p>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<p>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.389.357.972
2	Program Pemberdayaan Sosial	2.483.068.000
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	14.475.000
4	Program Rehabilitasi Sosial	16.483.904.400
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	466.056.000
6	Program Penanganan Bencana	249.863.000
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	454.457.700

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan rencana kerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Lombok Timur. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.5
Target Belanja Dinas Sosial pada APBD Perubahan Tahun 2021

URAIAN	TARGET (Rp.)	PERSENTASE
Belanja Tidak Langsung	3.116.753.697	
Belanja Langsung	12.414.228.375	
Jumlah	15.530.982.072	

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas Sosial yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	%	Ket.
1	Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	20.151.824.100	100%	Total belanja Langsung sebesar Rp. 21.416.828.375,-

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menampung 7 (Tujuh) program , 15 (lima belas) kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program , Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24,541,182,072	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,389,357,972	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,272,300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,704,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,567,600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,156,239,697	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,984,123,697	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172,116,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36,977,200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8,340,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	268,702,000	
	Pengadaan Mebel	50,784,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217,918,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397,184,600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,847,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,300,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348,037,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498,103,475	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23,735,675	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67,218,700	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407,149,100	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2,483,068,000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,483,068,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,026,946,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	551,600,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	904,522,000	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	14,475,000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	14,475,000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	14,475,000	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16,483,904,400	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7,940,997,600	
	Penyediaan Sandang	-	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	135,829,600	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,505,000,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	300,168,000	
	Rehabilitasi Sosial Penvandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8,542,906,800	

	Penyediaan Permakanaan	-	
	Penyediaan Sandang	7,604,007,300	
	Penyediaan Alat Bantu	32,000,000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	131,415,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	386,633,800	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	388,850,700	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	466,056,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	466,056,000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34,576,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	431,480,000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	249,863,000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94,671,000	
	Penyediaan Makanan	29,997,000	
	Penyediaan Sandang	20,100,000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25,202,000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12,696,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	6,676,000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	155,192,000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	155,192,000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	454,457,700	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	454,457,700	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	454,457,700	

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Evaluasi Capaian Hasil Pembangunan

Analisis Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Kinerja Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (permendagri 86/2017) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan

Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di atas sekaligus merupakan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang harus mencakup Materi muatan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

BIDANG SOSIAL

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- a. 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- b. 70 s.d. <85 = Baik
- c. 55 s.d. <70 = Cukup
- d. < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1) Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

2) Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Kinerja atau dengan kata lain Hasil Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja adalah bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah atas mandat yang diterima dari masyarakat dalam suatu periode tertentu. Ini dipergunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk merealisasikan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dengan realisasinya.

Adapun capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 sebagaimana dalam tabel 3.1 di bawah ini :

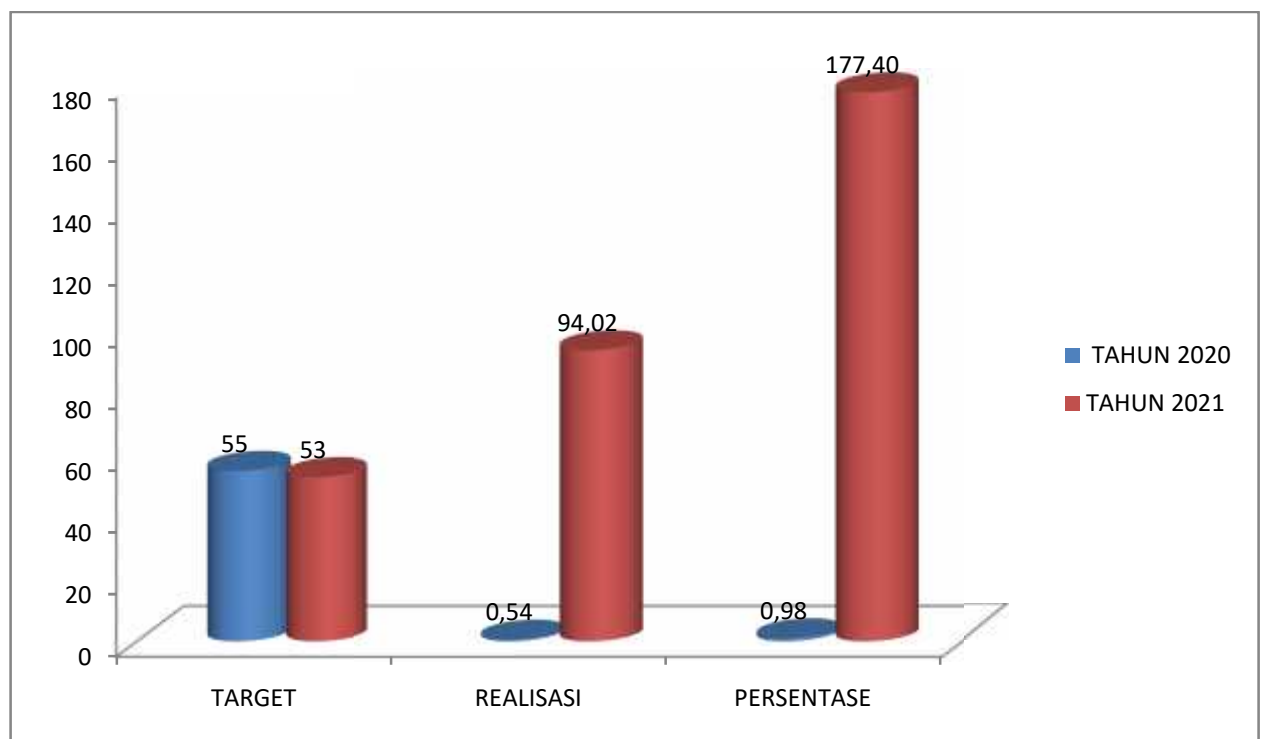
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosaial Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2021

No	Sasaranstrategis	Indikatorkinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2020
				Target	Realisasi	Persentase	Persentase
1.	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan Pengentasan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan PMKS	%	53	94,02	177,40	55

Dalam RPJMD perubahan tahun 2018-2023 indikator kinerja utama (IKU) Daerah yang terkait dalam Dinas Sosial adalah penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam hal ini terkait dengan Misi ke 3 Yaitu : "Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi local melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya". Dengan indicator sasaran strategis yang merupakan salah satu aspek kesejahteraan masyarakat dalam indikator kinerja yaitu : Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pada tahun 2021 ini indikator kinerja Dinas Sosial memenuhi target, dimana realisasi persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 94,02 atau 177,40 dari target 53%. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin, penyempurnaan pengukurannya kemiskinan terkait kriteria standar risasi dan pengelolaan BDT, mengembangkan dan penguatan system pemantauan dan evaluasi terkait pemantauan dasar serta Melakukan sosialisasi dan penerapan tentang SIKS-NG sebagai salah satu syarat untuk bisa diusulkan mendapatkan Bansos (Bantuan Sosial) baik itu Bansos di PKH, Bansos BPNT, Bansos Jaminan Kesehatan dan Kesehatan dan Pelayanan Bansos Lainnya yang sifatnya APBN.

Realisasi Tahun 2020 dan Realisasi Tahun 2021 dalam bentuk Grafik di bawah ini :



Pada tahun 2020 realisasi persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 0,54 atau sama dengan 0,98 % dari target 55 dimana jumlah PMKS yang ada pada tahun 2020 sebanyak 266.671 Jiwa dan yang sudah mendapatkan pelayanan sebanyak 1.443 Jiwa. Dan pada tahun 2021 realisasi melebihi dari target dimana jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 137.677 Jiwa yang sudah mendapatkan pelayanan sebanyak 129.440 Jiwa. Sehingga realisasi persentase PMKS sebesar 94,02 atau sama dengan 177,405 dari target 53.

4 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2021, Kantor Dinas Sosial telah menentukan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Rencana strategis.

Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan, dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dari 7 (tujuh) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2021 secara keseluruhan telah dilaksanakan dan dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Tingkat capaian kinerja dan Realisasi dengan indikator realisasi target dari masing-masing indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan 2021 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN/OUTPUT					ALOKASI ANGGARAN	
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Capaian Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	97,44	459.392.400	447.620.961
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Buah	1600	1600	98,91	37.551.500	37.141.600
	Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengguna Jasa Telpon Air dan Listrik	Unit	2	2	72,6	13.200.000	9.582.776
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	15	15	49,75	9.100.000	4.527.485
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	99,86	163.396.500	163.171.500
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Jenis	20	20	99,99	28.926.000	28.924.200
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	31	31	100	32.349.900	32.349.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	4	5	100	15.505.400	15.505.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	11	100	8.075.000	8.075.000

	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	6	6	100	82.688.100	82.688.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan yang Tersedia	Exemplar	900	900	94,22	34.450.000	32.460.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman	Kotak	710	710	93,7	15.150.000	14.195.000
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kali	15	15	100	19.000.000	19.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	31,28	1.074.704.800	888.486.162
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	1	1	26,94	204.094.800	54.990.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Siap Pakai	Unit	1	1	89,1	25.000.000	22.275.744
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Siap Pakai	Unit	16	16	82,96	75.000.000	62.219.418
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meublair	Jumlah Meublair yang Nyaman Untuk Bekerja	Unit	8	8	100	9.460.000	9.460.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Tempat Kerja	Gedung	1	1	97,16	761.150.000	739.541.000
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100	100	15.437.500	15.437.400

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Buku	15	15	100	15.437.500	15.437.400
4	PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ASSET/BARANG DAERAH	Persentase Pengelolaan Asset/Barang Daerah	Persen	100	100	100	15.851.500	15.851.500
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)	Jumlah Data Asset/Barang Milik Daerah	Persen	80	80	100	15.851.500	15.851.500
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	100	100	91,61	817.604.520	748.975.010
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Keterampilan	Persen	60	60	99,91	340.361.700	340.048.140
	Penanganan Kemiskinan Untuk Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah Data Keluarga Miskin	Persen	80	80	66,8	160.710.420	107.362.420
	Penyelenggaraan Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan (UPTPK)	Terbantunya Keluarga Miskin Untuk Mendapat Pelayanan	Persen	80	80	91,25	157.332.400	143.569.450
	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Memastikan Bantuan Tepat Sasaran	Persen	80	80	99,24	159.200.000	157.995.000
6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Terrehabilitasi	Persen	100	100	90,54	522.090.100	472.679.650

	Pelayanan dan Perlindungan, Hukum Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak	Terlayannya dan Terlindunginya Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak	Persen	80	80	90,01	81.081.100	72.981.100
	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centere Termasuk Korban Bencana	Mengurangi Fisikologis Korban	Persen	80	80	78,04	171.518.200	133.857.750
	Tanggap Darurat Terhadap Korban Bencana dan Orang Terlantar	Terbantunya Korban Bencana dan Orang Terlantar	Persen	80	80	98,65	269.490.800	265.840.800
7	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Persentase Anak Terlantar yang Telah Mandiri Setelah Dilakukan Pembinaan	Persen	100	100	94,97	212.973.400	202.268.400
	Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak yang Terlatih	Persen	80	80	97,12	112.973.400	109.723.400
	Penyusunan Data dan Pelaporan Siswa Yatim dan/Miskin	Tersedianya Data Siswa Yatim/Miskin	Persen	80	80	92,55	100.000.000	92.545.000
8	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Persentase Penyandang Cacat yang Telah Diberikan Bantuan	Persen	100	100	98,56	104.054.000	102.554.000
	Pembinaan dan Pengiriman Orang dengan Kecacatan	Pembinaan dan Pengiriman Orang Dengan Kecacatan	Persen	80	80	98,56	104.054.000	102.554.000
9	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	Persentase Penyandang Cacat yang Telah Diberikan Bantuan	Persen	100	100	99,86	106.000.000	105.853.000

	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti Jumbo	Jumlah Panti Asuhan/Panti Jumbo yang Dibantu	Persen	80	80	99,86	106.000.000	105.853.000
10	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Jumlah Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya (Cakupan Eks Penyandang Penyakit sosial yang Dibina	Persen	100	100	99,99	171.500.000	171.489.000
	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Penyandang Penyakit yang Dibantu	Persen	80	80	99,99	171.500.000	171.489.000
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial dan WKSBM yang Menyediakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	99,14	5.506.831.750	5.459.226.900
	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Terlaksananya Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Persen	80	80	99,86	623.700.000	622.849.600
	Pembinaan Organisasi Sosial, Karang Taruna dan WKBSDM	Terbinanya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persen	80	80	99,42	126.044.200	125.319.200
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya TMP Rinjani Selong	Persen	80	80	98,78	57.569.100	56.869.000
	Penelitian Monitoring dan Evaluasi Dokumen Usulan Bantuan Sosial dan Hibah	Terlaksananya Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah	Persen	80	80	99,88	30.000.000	29.964.400
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Mitra Kesejahteraan Sosial	Terbinanya Kelompok Masyarakat Mitra Kesejahteraan Sosial	Persen	80	80	99,86	4.254.518.450	4.248.355.700

	Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Terkelolanya Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Persen	80	80	82,65	220.000.000	181.831.000
	Pengadaan Bahan Pangan dan Kebutuhan Lainnya	Tersedianya Bahan Pangan dan Kebutuhan Lainnya	Persen	80	80	99,51	195.000.000	194.038.000
12	PROGRAM PENDAMPINGAN KELUARGA HARAPAN	Jumlah Pendamping PKH	Persen	100	100	99,91	608.900.000	608.341.600
	Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Terbinanya Keluarga Miskin	Persen	80	80	99,9	550.000.000	549.441.600
	Pemuktahiran Dan Evaluasi Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya Evaluasi dan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	80	80	100	58.900.000	58.900.000

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN/OUTPUT					ALOKASI ANGGARAN	
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						24.541.182.072	23.017.659.670
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100	91,36	91,36	4.389.357.972	4.009.921.012
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	98,54	98,54	20.272.300	19.976.800

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	20	18	90	9.704.700	9.409.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	20	18	90	10.567.600	10.567.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	97,2	97,2	3.156.239.697	3.067.878.939
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Tahun	1	1	100	2.984.123.697	2.904.559.839
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa	Bulan	12	12	100	172.116.000	163.319.100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah	%	100	95,37	95,37	11.878.700	11.328.700
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	20	18	90	11.878.700	11.328.700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	99,09	99,09	36.977.200	36.639.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik	Jenis	11	11	100	13.200.000	13.197.000
Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan pengadaan	Lembar	9.000	9.000	100	9.400.200	9.400.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bacaan	Eksplr	900	873	97	8.340.000	8.085.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	Kali	10	10	100	6.037.000	5.957.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	%	100	18,9	18,9	268.702.000	50.784.000

	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket	1	1	100	50.784.000	50.784.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	6	-	-	217.918.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan	%	100	98,5	98,5	397.184.600	391.238.036
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar	Eksplr	1.500	1.354	90,27	36.847.000	36.847.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan terbayar	Unit	11	10	90,91	12.300.000	11.853.436
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa	Bulan	12	12	95,83	348.037.600	342.537.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan	%	100	86,74	86,74	498.103.475	432.075.437
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan	Unit	1	1	100	23.735.675	23.169.150
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	15	14	93,33	67.218.700	63.116.287
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung/bangunan	Gedung	1	1	100	407.149.100	345.790.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%	80	79,99	99,99	2.483.068.000	2.290.523.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%	100	92,25	92,25	2.483.068.000	2.290.523.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping PKH yang mendapat bantuan	%	80	79,99	99,99	1.026.946.000	1.026.946.000

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbinanya lembaga kesejahteraan sosial	%	80	80	100	551.600.000	551.600.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pelayanan	%	80	78,71	98,39	904.522.000	711.977.000
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penurunan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	80	20,28	25,35	14.475.000	2.935.000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	%	80	20,28	25,35	14.475.000	2.935.000
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	%	20	5	25	14.475.000	2.935.000
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.	%	80	75,89	94,86	16.483.904.400	15.636.543.958

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	%	100	97,6	97,6	7.940.997.600	7.750.461.600
	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang	%	-	-	-	-	-
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial	%	100	7,58	7,58	135.829.600	10.293.600
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses Layanan	%	100	100	100	7.505.000.000	7.505.000.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan	%	100	78,35	78,35	300.168.000	235.168.000
	Rehabilitasi Sosial Penvandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar.	%	100	80	80	8.542.906.800	7.886.082.358
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pemakam	%	100	-	-	-	-
	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang	%	100	93,23	93,23	7.604.007.300	7.269.001.300
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu	%	100	37,5	37,5	32.000.000	12.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Bimbingan	%	100	5,01	5,01	131.415.000	6.590.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Data Keluarga Miskin	%	80	77,51	96,89	386.633.800	374.607.598
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama	%	100	57,58	57,58	388.850.700	223.883.460

5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial.	%	80	79,99	99,99	466.056.000	462.570.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan data Fakir Miskin	%	100	99,25	99,25	466.056.000	462.570.000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah yang Terdata	%	100	92,28	92,28	34.576.000	31.906.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang Dikelola	%	100	99,81	99,81	431.480.000	430.664.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial Tepat Sasaran	%	80	-	-	-	-
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.	%	80	72,51	90,63	249.863.000	181.164.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	100	28,28	28,28	94.671.000	26.772.000
	Penyediaan Makanan	Jumlah Makanan	%	100	-	-	29.997.000	-
	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang	%	100	100	100	20.100.000	20.100.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan	%	100	-	-	25.202.000	-
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Kebutuhan Pasca Bencana	%	80	-	-	12.696.000	-
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Layanan Dukungan	%	100	99,94	99,94	6.676.000	6.672.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang mendapatkan Perlindungan Sosial	%	100	79,99	79,99	155.192.000	154.392.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi	%	100	99,48	99,48	155.192.000	154.392.000

7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.	%	80	76,4	95,5	454.457.700	434.002.700
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.	Unit	2	2	100	454.457.700	434.002.700
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP yang Tertata Indah	Unit	1	1	100	454.457.700	434.002.700

D.AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dialokasikan pada masing – masing Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Anggaran dan realisasi belanja Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24,541,182,072.00	23,017,659,670	1,523,522,402
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,389,357,972	4,009,921,012	379,436,960
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,272,300	19,976,800	295,5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,704,700	9,409,200	295,5

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,567,600	10,567,600	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,156,239,697	3,067,878,939	88,360,758
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,984,123,697	2,904,559,839	79,563,858
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172,116,000	163,319,100	8,796,900
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,878,700	11,328,700	550
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,878,700	11,328,700	550
Administrasi Umum Perangkat Daerah	36,977,200	36,639,100	338,1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,200,000	13,197,000	3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,400,200	9,400,100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,340,000	8,085,000	255
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,037,000	5,957,000	80
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	268,702,000	50,784,000	217,918,000
Pengadaan Mebel	50,784,000	50,784,000	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217,918,000	0	217,918,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397,184,600	391,238,036	5,946,564

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,847,000	36,847,000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,300,000	11,853,436	446,564
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348,037,600	342,537,600	5,500,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498,103,475	432,075,437	66,028,038
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23,735,675	23,169,150	566,525
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67,218,700	63,116,287	4,102,413
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407,149,100	345,790,000	61,359,100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2,483,068,000	2,290,523,000	192,545,000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,483,068,000	2,290,523,000	192,545,000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,026,946,000	1,026,946,000	0
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	551,600,000	551,600,000	0

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	904,522,000	711,977,000	192,545,000
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	14,475,000	2,935,000	11,540,000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	14,475,000	2,935,000	11,540,000
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	14,475,000	2,935,000	11,540,000
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16,483,904,400	15,636,543,958	847,360,442
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7,940,997,600	7,750,461,600	190,536,000
	Penyediaan Sandang	0	0	0
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	135,829,600	10,293,600	125,536,000

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,505,000,000	7,505,000,000	0
	Pemberian Layanan Kedaruratan	300,168,000	235,168,000	65,000,000
	Rehabilitasi Sosial Penvandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8,542,906,800	7,886,082,358	656,824,442
	Penyediaan Permakanan	0	0	0
	Penyediaan Sandang	7,604,007,300	7,269,001,300	335,006,000
	Penyediaan Alat Bantu	32,000,000	12,000,000	20,000,000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	131,415,000	6,590,000	124,825,000
	Pemberian Layanan Rujukan	386,633,800	374,607,598	12,026,202
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	388,850,700	223,883,460	164,967,240
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	466,056,000	462,570,000	3,486,000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	466,056,000	462,570,000	3,486,000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34,576,000	31,906,000	2,670,000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	431,480,000	430,664,000	816

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	0	0
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	249,863,000	181,164,000	68,699,000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94,671,000	26,772,000	67,899,000
	Penyediaan Makanan	29,997,000	0	29,997,000
	Penyediaan Sandang	20,100,000	20,100,000	0
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25,202,000	0	25,202,000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12,696,000	0	12,696,000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	6,676,000	6,672,000	4
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	155,192,000	154,392,000	800
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	155,192,000	154,392,000	800
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	454,457,700	434,002,700	20,455,000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	454,457,700	434,002,700	20,455,000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	454,457,700	434,002,700	20,455,000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 24.541.182.072 sementara Realisasi sebesar Rp. 23.017.659.670 atau 93,79%. Sisa anggaran Rp. 1.515.922.402,- Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang sudah diajukan SP2D dan belum direalisasi dan realisasinya ditangguhkan tahun berikutnya (tahun 2022) berjumlah Rp.863.203.977,- , RP. 652.718.424,- Merupakan sisa SPD dan pandemi Covid-19 yang juga melanda Kabupaten Lombok Timur, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap persentase peningkatan capaian Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai jenis pelayanan Dasar.

I. BIDANG URUSAN SOSIAL

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial kabupaten/kota berdasarkan Permendagri Nomor 100

Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Minimal terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususx Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

TABEL 3.5
TARGET PENCAPAIAN SPM DINAS SOSIAL

NO	Standar Pelayanan Minimal			Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	- Penyediaan Permakanan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Sandang	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Alat Bantu	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian perbekalan kesehatan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	100%	DINAS SOSIAL
		- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu identitas anak	100%	DINAS SOSIAL
		- Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
- Layanan Rujukan	100%	DINAS SOSIAL		

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Data dan Pengaduan 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru 	100%	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Data dan Pengaduan - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Alat Bantu - Penyediaan Perbekalan Kesehatan - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Permakanan 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sandang 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Alat Bantu 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Perbekalan Kesehatan 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial 	100%	DINAS SOSIAL
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar 	100%	DINAS SOSIAL

		- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu identitas anak	100%	DINAS SOSIAL
		- Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Layanan Rujukan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100%	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	- Layanan Data dan Pengaduan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100%	DINAS SOSIAL

	-	Penyediaan Permakanan	100%	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Sandang	100%	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Alat Bantu	100%	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100%	DINAS SOSIAL
	-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100%	DINAS SOSIAL
	-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	100%	DINAS SOSIAL
	-	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100%	DINAS SOSIAL
	-	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
	-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
	-	Layanan Rujukan	100%	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100%	DINAS SOSIAL
	-	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu identitas anak	100%	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100%	DINAS SOSIAL

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	- Layanan Data dan Pengaduan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Permakanan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Sandang	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Alat Bantu	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	100%	DINAS SOSIAL
		- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu identitas anak	100%	DINAS SOSIAL
		- Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100%	DINAS SOSIAL
		- Layanan Rujukan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100%	DINAS SOSIAL

		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100%	DINAS SOSIAL
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota	- Penyediaan Permakanan	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan Sandang	100%	DINAS SOSIAL
		- Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%	DINAS SOSIAL
		- Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%	DINAS SOSIAL
		- Pelayanan dukungan psikososial	100%	DINAS SOSIAL

Realisasi

NO	Standar Pelayanan SPM					
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Dalam Tahun (Orang)	Target Dalam Tahun (%)	Jumlah Capaian Sasaran (Orang)	Realisasi (%) (6:4)x100
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	- Penyediaan Permakanan	1.691	100	109	6,45
		- Penyediaan Sandang	0	0	0	0
		- Penyediaan Alat Bantu	1691	100	83	4,91
		- Pemberian perbekalan kesehatan	0	0	0	0
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	1691	100	5	0,30
		- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu identitas anak	0	0	0	0
		- Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0
		- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	0	0	0	0
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0

		- Layanan Rujukan	1691	100	4	0,24
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0
		- Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	0
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	- Layanan Data dan Pengaduan	5281	100	89	1,69
		- Penyediaan Permakanan	5281	100	1707	32,32
		- Penyediaan Sandang	0	0	0	0
		- Penyediaan Alat Bantu	0	0	0	0
		- Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	5281	100	48	0,91
		- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	0	0
		- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu identitas anak	5281	100	7	0,13
		- Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	5281	100	1700	32,19
		- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	5281	100	2	0,04
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5281	100	2	0,04
		- Layanan Rujukan	5281	100	6	0,11
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0

		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	0
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	- Layanan Data dan Pengaduan	6654	100	1584	23,81
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0
		- Penyediaan Permakanan	6654	100	20	0,30
		- Penyediaan Sandang	0	0	0	0
		- Penyediaan Alat Bantu	0	0	0	0
		- Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	0
		- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	0	0	0	0
		- Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0
		- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	0	0	0	0
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0
		- Layanan Rujukan	6654	100	3	0,05
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0
		- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu identitas anak	0	0	0	0

		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	0
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	- Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	0
		- Penyediaan Permakanan	0	0	0	0
		- Penyediaan Sandang	0	0	0	0
		- Penyediaan Alat Bantu	0	0	0	0
		- Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	0
		- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	0	0	0	0
		- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu identitas anak	0	0	0	0
		- Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0
		- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	0	0	0	0
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	0
		- Layanan Rujukan	0	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	0
		- Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0

		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota	- Penyediaan Permakanaan	1907	100	1907	100
		- Penyediaan Sandang	1907	100	1907	100
		- Penyediaan tempat penampungan pengungsi	106	100	106	100
		- Penanganan khusus bagi kelompok rentan	32	100	32	100
		- Pelayanan dukungan psikososial	85	100	85	100

3.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berjumlah Rp. 24.541.182.072,- dengan rincian sebagai berikut

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	4.389.357.972
2	Program Pemberdayaan Sosial	2.483.068.000
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	14.475.000
4	Program Rehabilitasi Sosial	16.483.904.400
5	Program Perlindungan dan jaminan sosial	466.056.000
6	Program Penanganan Bencana	249.863.000
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	454.457.700

Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 sebanyak 98 Orang dengan perincian:

- 1) PNS/CPNS :28Orang
- 2) Honorer :700rang

Jumlah tenaga PNS/CPNS sebanyak 28 orang, berdasarkan kualifikasi pendidikan formal dan Pangkat Golongan dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Golongan	Pejabat struktural	Pejabat fungsional
1	2	3	4	5
28	SD :	Golongan I :	Eselon II b :1	
	SMP : 1	Golongan II : 4	Eselon III/a :1	
	SMA : 4	Golongan III : 17	Eselon III/b : 3	
	D1 :	Golongan IV : 7	Eselon IV/a : 15	
	D2:			
	D3: 2			
	D4: 2			
	S1: 16			
	S2 : 3			
	S3: -			

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 antara lain :

Permasalahan Internal Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, antara lain :

- 1) Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai;
- 3) Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
- 4) Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial

- b. Permasalahan Eksternal Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, antara lain :

- 1) Masih kurangnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di lingkungan Masyarakat;
- 2) Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 3) Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 4) Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/ CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 5) Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.

SOLUSI

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 antara lain :

- 1) Adanya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- 2) Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

B. SPM BIDANG SOSIAL

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 16.578.575.400,- yang bertujuan melaksanakan program dan kegiatan yang terdiri dari:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	8	9	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16.483.904.400	15.636.543.958	94,86
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7.940.997.600	7.750.461.600	97,60
	Penyediaan Sandang	-	-	-
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	135.829.600	10.293.600	7,58
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.505.000.000	7.505.000.000	100,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	300.168.000	235.168.000	78,35
	Rehabilitasi Sosial Penvandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8.542.906.800	7.886.082.358	92,31
	Penyediaan Permakanan	-	-	-
	Penyediaan Sandang	7.604.007.300	7.269.001.300	95,59
	Penyediaan Alat Bantu	32.000.000	12.000.000	37,50
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	131.415.000	6.590.000	5,01
	Pemberian Layanan Rujukan	386.633.800	374.607.598	96,89
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	388.850.700	223.883.460	57,58
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	94.671.000	26.772.000	28,28
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.671.000	26.772.000	28,28
	Penyediaan Makanan	29.997.000	-	0,00
	Penyediaan Sandang	20.100.000	20.100.000	100,00
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25.202.000	-	0,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.696.000	-	0,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.676.000	6.672.000	99,94

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan LAKIP ini dapat mengetahui dan menilai Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah dilakukan suatu kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2021. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di masing-masing Bidang, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renja Dinas setiap tahunnya.

Selong, 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur



MAHSIN, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199203 1126